

PENDIDIKAN PANCASILA

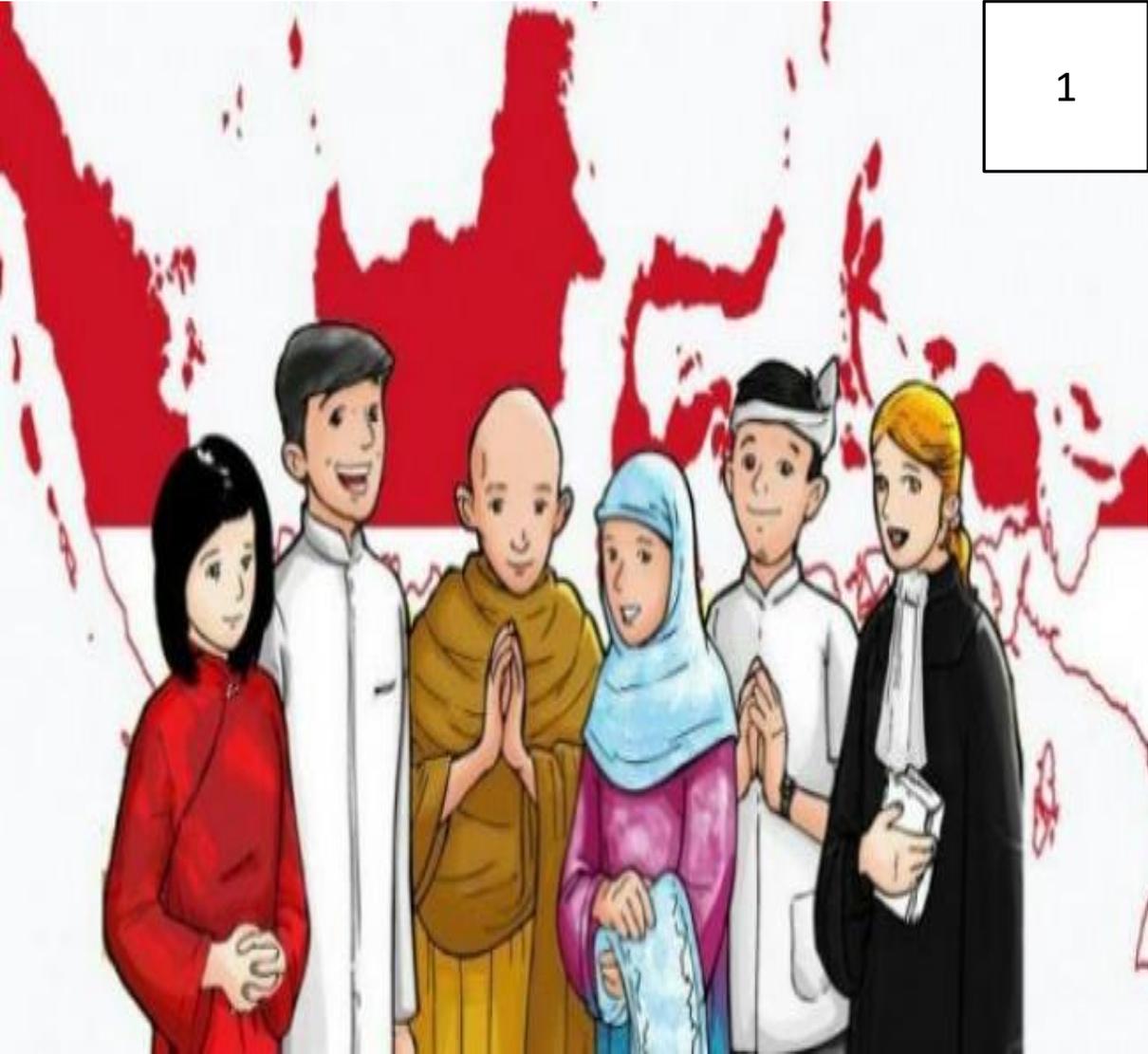
I PUTU SASTRA WIBAWA

2022



ILUSTRASI GAMBAR

1



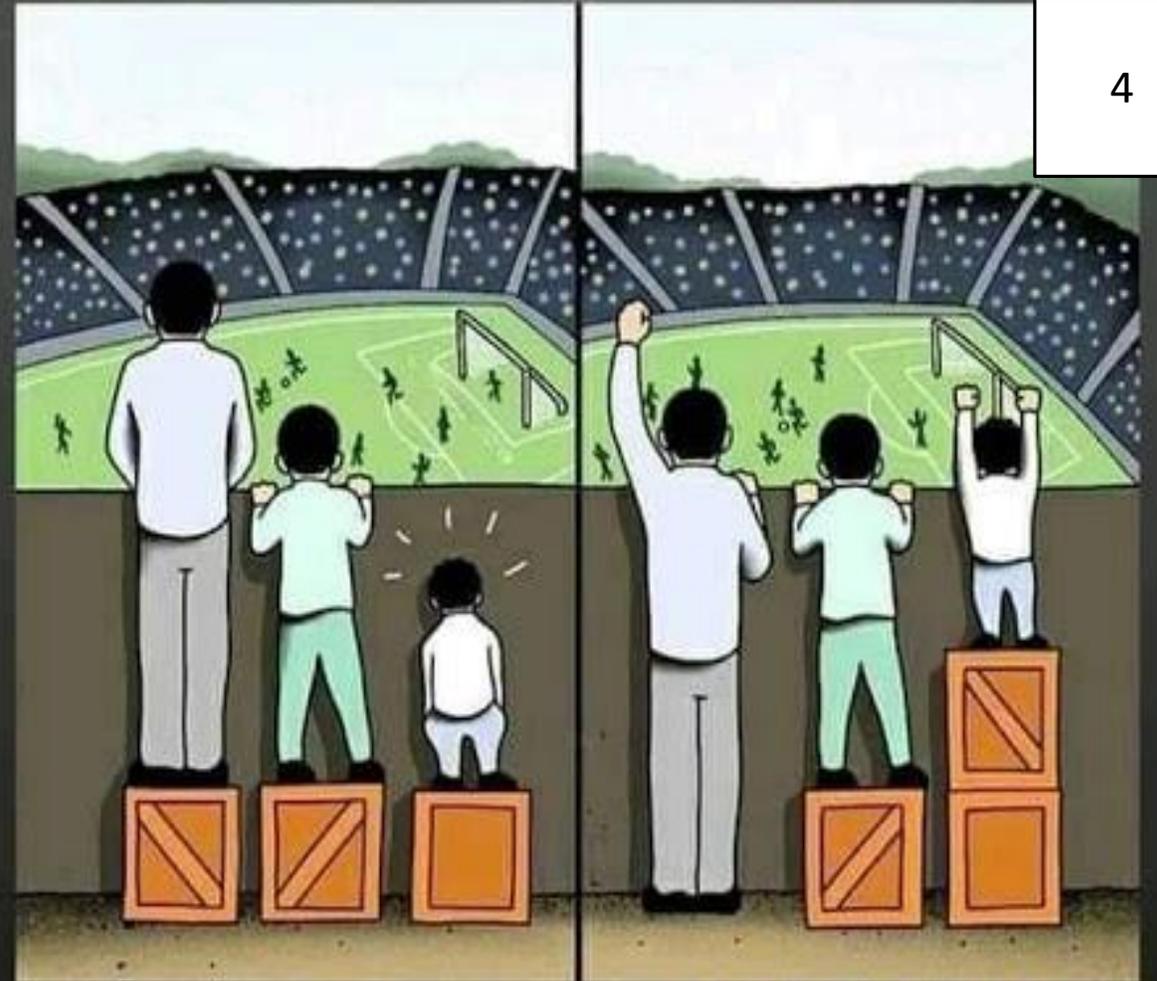
2



ILUSTRASI GAMBAR



3



4

ADIL

KEADILAN

PENDIDIKAN PANCASILA DENGAN EKONOMI

HUBUNGANNYA ?

PASAL 33 UUD NRI 1945=LANDASAN EKONOMI INDONESIA

- 1) PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASAR **ATAS ASAS KEKELUARGAAN.**
- 2) CABANG-CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN YANG **MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI NEGARA**
- 3) BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK **SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT**
- 4) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASAR ATAS **DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN EFISIENSI BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN, SERTA DENGAN MENJAGA KESEIMBANGAN KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI NASIONAL.**

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH

LAHIRNYA KETENTUAN DALAM PASAL 35 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 YANG MENYATAKAN BAHWA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN PANCASILA, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, DAN BAHASA INDONESIA, MENUNJUKKAN BAHWA NEGARA BERKEHENDAK AGAR PENDIDIKAN PANCASILA DILAKSANAKAN DAN WAJIB DIMUAT DALAM KURIKULUM PEGURUAN TINGGI SEBAGAI MATA KULIAH YANG BERDIRI SENDIRI.

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH

PENDIDIKAN PANCASILA DIHARAPKAN MENJADI RUH DALAM MEMBENTUK JATI DIRI MAHASISWA DALAM MENGEMBANGKAN JIWA PROFESIONALITAS MEREKA SESUAI DENGAN BIDANG STUDI Masing-masing. SELAIN ITU, DENGAN MENGACU KEPADA KETENTUAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012, SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA HARUS BERDASARKAN PANCASILA

MAHASISWA DIHARAPKAN DAPAT MENGUASAI KOMPETENSI: BERSYUKUR ATAS KARUNIA KEMERDEKAAN DAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA; MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF TERHADAP PENTINGNYA PENDIDIKAN PANCASILA; MENJELASKAN TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI KOMPONEN MATA KULIAH WAJIB UMUM PADA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA; MENALAR DAN MENYUSUN ARGUMENTASI PENTINGNYA PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI KOMPONEN MATA KULIAH WAJIB UMUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA.

PERTEMUAN KE II

SEJARAH PANCASILA

JUMLAH bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain:



45 helai bulu di leher

17 helai bulu pada masing-masing sayap

19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor

8 helai bulu pada ekor



Ketuhanan yang Maha Esa



Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



Persatuan Indonesia



Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan



Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

PANCASILA IDEOLOGI BANGSA KITA



Kekalahan Jepang



Jepang makin terdesak di Perang Pasifik, Pemerintah menyiapkan kepanitiaan kemerdekaan Indonesia.

Akhir 1944

Keadaan Jepang dalam Perang



*Dr. K.R.T Radjiman Widyodiningrat
Ketua BPUPKI 1945*

1 Maret 1945

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). KRT Radjiman Widyodiningrat menjadi ketuanya.

Sidang pertama BPUPKI digelar. Moh Yamin dan Soepomo mengusulkan adanya lima hal dasar sebagai asas dan prinsip Indonesia merdeka.

28 Mei-1 Juni 1945



Suasana Sidang BPUPKI



Pembacaan Pancasila versi Soekarno

1 Juni 1945

Usulan dalam sidang BPUPKI diracik oleh Soekarno kemudian lahirlah Pancasila dan dibacakan pada sidang BPUPKI.

Rumusan Pancasila menghasilkan Piagam Jakarta.

22 Juni 1945



Piagam Jakarta

Piagam Jakarta dirumuskan menjadi UUD 1945.

18 Agustus 1945

Ideologi Negara yang utuh, kokoh dan sinambung selamanya

Pancasila adalah Pemersatu Bangsa

1 Juni ditetapkan menjadi hari kelahiran Pancasila

PERTEMUAN KE III

PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA INDONESIA

PANCASILA SEBAGAI **IDENTITAS KULTURAL** DAPAT DITELUSURI DARI KEHIDUPAN AGAMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT INDONESIA. KARENA TRADISI DAN KULTUR BANGSA INDONESIA DAPAT DIITELUSURI MELALUI **PERAN AGAMA-AGAMA BESAR**, SEPERTI: PERADABAN HINDU, BUDDHA, ISLAM, DAN KRISTEN. AGAMA-AGAMA TERSEBUT MENYUMBANG DAN **MENYEMPURNAKAN KONSTRUKSI NILAI, NORMA, TRADISI, DAN KEBIASAAN-KEBIASAAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT**. MISALNYA, KONSTRUKSI TRADISI DAN KULTUR MASYARAKAT MELAYU, MINANGKABAU, DAN ACEH

PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA

PANCASILA DISEBUT JUGA SEBAGAI **KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA**, ARTINYA NILAI-NILAI KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, KERAKYATAN, DAN KEADILAN DIWUJUDKAN DALAM SIKAP MENTAL DAN TINGKAH LAKU SERTA AMAL PERBUATAN.

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

PANCASILA DIKATAKAN SEBAGAI **PANDANGAN HIDUP BANGSA**, ARTINYA NILAI-NILAI KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, KERAKYATAN, DAN KEADILAN DIYAKINI KEBENARANNYA, KEBAIKANNYA, KEINDAHANNYA, DAN KEGUNAANNYA OLEH BANGSA INDONESIA YANG DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERBANGSA DAN MENIMBULKAN TEKAD YANG KUAT UNTUK MENGAMALKANNYA DALAM KEHIDUPAN NYATA

PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA

SEBAGAIMANA DIKATAKAN VON SAVIGNY BAHWA SETIAP BANGSA MEMPUNYAI JIWANYA MASING-MASING, YANG DINAMAKAN VOLKGEIST (**JIWA RAKYAT ATAU JIWA BANGSA**). PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA LAHIR BERSAMAAN DENGAN LAHIRNYA BANGSA INDONESIA. PANCASILA TELAH ADA SEJAK DAHULU KALA BERSAMAAN DENGAN ADANYA BANGSA INDONESIA

PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR

PERJANJIAN LUHUR, ARTINYA NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA DAN KEPRIBADIAN BANGSA DISEPAKATI OLEH PARA PENDIRI NEGARA (POLITICAL CONSENSUS) SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA (BAKRY, 1994: 161). KESEPAKATAN PARA PENDIRI NEGARA TENTANG PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA MERUPAKAN BUKTI BAHWA PILIHAN YANG DIAMBIL PADA WAKTU ITU MERUPAKAN SESUATU YANG TEPAT

PERTEMUAN IV

HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

DIMENSI REALITAS; MENGANDUNG MAKNA BAHWA NILAI-NILAI DASAR YANG TERKANDUNG DALAM DIRINYA BERSUMBER DARI **NILAI-NILAI REAL** YANG HIDUP DALAM MASYARAKATNYA.

DIMENSI IDEALITAS; **MENGANDUNG CITA-CITA** YANG INGIN DICAPAI DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA.

DIMENSI FLEKSIBILITAS; MENGANDUNG RELEVANSI ATAU KEKUATAN YANG MERANGSANG MASYARAKAT UNTUK MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN-PEMIKIRAN BARU TENTANG NILAI-NILAI DASAR YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA. PANCASILA SEBAGAI **IDEOLOGI BERSIFAT TERBUKA** KARENA BERSIFAT DEMOKRATIS

ESENSI (HAKIKAT) PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

PERTAMA; HAKIKAT SILA KETUHANAN TERLETAK PADA KEYAKINAN BANGSA INDONESIA BAHWA TUHAN SEBAGAI PRINSIP UTAMA DALAM KEHIDUPAN SEMUA MAKHLUK. ARTINYA, SETIAP MAKHLUK HIDUP, TERMASUK WARGA NEGARA HARUS MEMILIKI KESADARAN YANG OTONOM (KEBEBASAN, KEMANDIRIAN) DI SATU PIHAK, DAN BERKESADARAN SEBAGAI MAKHLUK TUHAN YANG MAHA ESA YANG AKAN DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKAN.

KEDUA; HAKIKAT SILA KEMANUSIAAN ADALAH MANUSIA MONOPLURALIS, YANG TERDIRI ATAS 3 MONODUALIS, YAITU SUSUNAN KODRAT (JIWA, RAGA), SIFAT KODRAT (MAKHLUK INDIVIDU, SOSIAL), KEDUDUKAN KODRAT (MAKHLUK PRIBADI YANG OTONOM DAN MAKHLUK TUHAN) (NOTONAGORO)

HAKIKAT PANCASILA LANJUTAN.....

KETIGA, HAKIKAT SILA PERSATUAN TERKAIT DENGAN SEMANGAT KEBANGSAAN. RASA KEBANGSAAN TERWUJUD DALAM BENTUK CINTA TANAH AIR, YANG DIBEDAKAN KE DALAM 3 JENIS, YAITU TANAH AIR REAL, TANAH AIR FORMAL, DAN TANAH AIR MENTAL.

KEEMPAT, HAKIKAT SILA KERAKYATAN TERLETAK PADA PRINSIP MUSYAWARAH. ARTINYA, KEPUTUSAN YANG DIAMBIL LEBIH DIDASARKAN ATAS SEMANGAT MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT, BUKAN MEMBENARKAN BEGITU SAJA PENDAPAT MAYORITAS TANPA PEDULI PENDAPAT MINORITAS.

KELIMA, HAKIKAT SILA Keadilan TERWUJUD DALAM TIGA ASPEK, YAITU Keadilan Distributif, Legal, dan Komutatif. Keadilan Distributif adalah keadilan bersifat membagi dari Negara kepada Warga Negara. Keadilan Legal adalah kewajiban Warga Negara terhadap Negara atau dinamakan keadilan Bertaat. Keadilan Komutatif adalah keadilan antara sesama Warga Negara

HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

PERTAMA, HAKIKAT SILA KETUHANAN TERLETAK PADA KEYAKINAN BANGSA INDONESIA BAHWA TUHAN SEBAGAI PENJAMIN PRINSIP-PRINSIP MORAL. ARTINYA, SETIAP PERILAKU WARGA NEGARA HARUS DIDASARKAN ATAS NILAI-NILAI MORAL YANG BERSUMBER PADA NORMA AGAMA.

KEDUA, HAKIKAT SILA KEMANUSIAAN TERLETAK PADA ACTUS HUMANUS, YAITU TINDAKAN MANUSIA YANG MENGANDUNG IMPLIKASI DAN KONSEKUENSI MORAL YANG DIBEDAKAN DENGAN ACTUS HOMINI, YAITU TINDAKAN MANUSIA YANG BIASA.

KETIGA, HAKIKAT SILA PERSATUAN TERLETAK PADA KESEDIAAN UNTUK HIDUP BERSAMA SEBAGAI WARGA BANGSA YANG MEMENTINGKAN MASALAH BANGSA DI ATAS KEPENTINGAN INDIVIDU ATAU KELOMPOK. SISTEM ETIKA YANG BERLANDASKAN PADA SEMANGAT KEBERSAMAAN, SOLIDARITAS SOSIAL AKAN MELAHIRKAN KEKUATAN UNTUK MENGHADAPI PENETRASI NILAI YANG BERSIFAT MEMECAH BELAH BANGSA.

HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI ETIKA LANJUTAN...

KEEMPAT, HAKIKAT SILA KERAKYATAN TERLETAK PADA PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT. ARTINYA, MENGHARGAI DIRI SENDIRI SAMA HALNYA DENGAN MENGHARGAI ORANG LAIN.

KELIMA, HAKIKAT SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI SISTEM ETIKA YANG TIDAK MENEKANKAN PADA KEWAJIBAN SEMATA (DEONTOLOGIS) ATAU MENEKANKAN PADA TUJUAN BELAKA (TELEOLOGIS), TETAPI LEBIH MENONJOLKAN KEUTAMAAN (VIRTUE ETHICS) YANG TERKANDUNG DALAM NILAI KEADILAN ITU SENDIRI.

PERTEMUAN V

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

CIRI-CIRI

1. **REALITAS**, ARTINYA SISTEM NILAI, GAGASAN PEMIKIRAN YANG MENDASAR DAN MENDALAM ITU SELALU ADA DI DALAM MASYARAKAT, SELALU TERCERMIN DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
2. **IDEALITAS**, ARTINYA KADAR DAN KUALITAS IDEOLOGI ITU MERUPAKAN SESUATU YANG IDEAL, CITA-CITA YANG DIHARAPKAN OLEH SELURUH BANGSA. **IDEALISME** YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA ITU MAMPU MEMBERIKAN HARAPAN, OPTIMISME, MAMPU MENGGUGAH MOTIVASI PENDUKUNGNYA, MAMPU MENGGERAKKAN PENDUKUNGNYA UNTUK BERUPAYA MEWUJUDKAN APA YANG MENJADI CITA-CITA IDEOLOGI TSB.
3. **FLEKSIBILITAS**, ARTINYA IDEOLOGI ITU MAMPU MENYESUAIKAN DIRI DENGAN KEADAAN YANG TERUS MENERUS BERKEMBANG DAN MAMPU MEMBERI ARAH MELALUI INTERPRETASI-INTERPRETASI BARU.

PANCASILA DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA KARENA MEMILIKI: NILAI DASAR, NILAI INSTRUMENTAL, DAN NILAI PRAKSIS.

1. **NILAI DASAR** PANCASILA MEMILIKI NILAI-NILAI ESSENSIAL (MENDASAR) YAITU NILAI KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, KERAKYATAN, DAN KEADILAN.
2. **NILAI INSTRUMENTAL** DISEBUT DENGAN NILAI ALAT YANG MERUPAKAN NORMA-NORMA YANG LEBIH OPERASIONAL RUMUSANNYA. BERISI ATURAN-ATURAN POKOK YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI LANDASAN BAGI PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAN PEMBUATAN PERUNDANGAN YANG LEBIH KONKRIT.
3. **NILAI PRAKSIS** BERKAITAN DENGAN ATURAN-ATURAN KONKRIT YANG DIPAKAI UNTUK MENGATUR DAN MENYELESAIKAN PERSOALAN-PERSOALAN KEHIDUPAN NEGARA YANG KHUSUS, BERKAITAN DENGAN BERBAGAI YAITU BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, HUKUM, HANKAM DSB. SEMUA PRODUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PERTEMUAN VI

KONSEP DASAR PANCASILA SEBAGAI SUATU **SISTEM SISTEMATIKA**

- 1. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM SISTEMATIKA DAPAT DIARTIKAN BAHWA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM YANG MEMILIKI SISTEMATIKA YANG TIDAK DAPAT DILEPASKAN ANTARA SILA SATU DENGAN YANG LAINNYA DAN TIDAK BOLEH ADA URUTAN YANG BERUBAH ANTARA SILA SATU DENGAN YANG LAINNYA**
- 2. SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM MEMILIKI HUBUNGAN DIJIWAI DAN SALING MENJIWAI**
- 3. SILA 1, Menjiwai SILA 2, 3, 4 dan 5 DAN SETERUSNYA**

PERTEMUAN VII

PANCASILA DAN KEARIFAN LOKAL

I PUTU SASRA WIBAWA

-
1. **PENGUATAN** PELAKSANAAN NILAI-NILAI PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA HARUSLAH DITANAMKAN SEJAK DINI DALAM BERBAGAI KESEMPATAN TERMASUK DALAM PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL, DAN INFORMAL DI PROVINSI BALI.

PRINSIP PENDIDIKAN PANCASILA

- ❖ **SPIRITUALITAS;**
- ❖ **KEMANUSIAAN YANG MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA;**
- ❖ **PERSATUAN DALAM KEBHINEKAAN;**
- ❖ **DEMOKRATIS, BERKEADILAN, DAN TIDAK DISKRIMINATIF;**
- ❖ **KEARIFAN LOKAL; DAN**
- ❖ **KEBERLANJUTAN.**

CARA MENYEBARLUASKAN PENDIDIKAN PANCASILA

PENDIDIKAN FORMAL;

PENDIDIKAN NONFORMAL;

PENDIDIKAN INFORMAL.

BAIK LANGSUNG ATAU MELALUI
PERANTARA MEDIA ELEKTRONIK

PENDEKATAN PENDIDIKAN PANCASILA

1. **PARTISIPATIF**;
2. **INOVATIF**; Terus menerus berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada
3. **DEMOKRATIS**;
4. **KEBENARAN**; Berkesesuaian antara pengetahuan dengan obyek yang dikaji.
5. **KETERBUKAAN**;
6. **KEBERSAMAAN**;
7. **AKADEMIS**; Bersifat ilmiah berbasis hasil penelitian.
8. **KEARIFAN LOKAL**.

PRINSIP EKB

(Koster, 2021:
21)

IMPLEMENTASI PERLU
INSTRUMEN HUKUM
MENJAMIN
KEPASTIAN

Ekonomi Untuk Mewujudkan
Bali Berdikari Dalam Bidang
Ekonomi, Dibangun Dan
Dikembangkan Berlandaskan
Nilai-nilai Filosofi *Sad Kerthi*

Upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*)

1. POTENSI EKONOMI ANUGRAH TUHAN YANG MAHA KUASA.
2. OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DAYA LOKAL.
3. KRAMA BALI AKTIF BERUSAHA.
4. EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL.
5. PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN.
6. EKONOMI LOKAL BERKUALITAS DAN KOMPETITIF.
7. EKONOMI BERBASIS IPTEK.
8. PEMBANGUNAN EKONOMI BERMANFAAT SECARA SEKALANISKALA.
9. EKONOMI GOTONG ROYONG
10. EKONOMI TANGGUH TERHADAP DINAMIKA ZAMAN.
11. SPIRIT EKONOMI KRAMA BALI JENGAH.

PERDA 4/ 2019
TENTANG DESA ADAT
DI BALI

BUDAYA HUKUM
DALAM BIDANG
EKONOMI
MASYARAKAT
BALI

1. *kawigunan/kemanfaatan;*
2. *padumpada/keadilan;*
3. *manyama braya/kekeluargaan;*
4. *gilik-saguluk/kebersamaan;*
5. *parasparo/musyawah;*
6. *salunglung sabayantaka/kegotongroyongan;*
7. *sarwaada/anekatawa/keberagaman;*
8. *Bali mawacara/kesatuan Bali;*
9. *satyagraha (kemandirian);*
10. *sareng-sareng/partisipasi;*
11. *pangunadikaan (pemberdayaan)*
12. *melanting (keberlanjutan).*